

BAB II

KERJASAMA DAN HUBUNGAN TIONGKOK DENGAN INDONESIA SEBELUM HINGGA PASCA TERJADINYA PANDEMI COVID-19

Pada bab II ini penulis memberikan gambaran terkait kerjasama dan hubungan diplomatik yang erat diantara Tiongkok dan Indonesia ketika sebelum hingga pasca terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis di berbagai negara termasuk kedua negara tersebut. Dalam bab ini juga akan memaparkan bagaimana strategi diplomasi Tiongkok melalui pemberian bantuan penanganan Covid-19 di Indonesia di tengah krisis dan citra buruk Tiongkok akibat tuduhan menjadi penyebab penyebaran virus Covid-19 ke berbagai negara.

2.1 Hubungan Kerjasama Bilateral Indonesia-Tiongkok Sebelum Pandemi Covid-19 di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Setelah 10 tahun menjabat, Presiden Susilo Bambang Yudhono lengser dan digantikan oleh Presiden terpilih selanjutnya yaitu Joko Widodo. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, hubungan bilateral antara Indonesia-Tiongkok semakin harmonis jika dibandingkan kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya serta mengalami peningkatan kerja sama di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi dan investasi. Intensitas pertemuan diantara Tiongkok dengan Indonesia di era Pemerintahan Jokowi yang cukup sering termasuk disela-sela pertemuan internasional untuk membahas pengembangan hubungan diantara keduanya maka tidak heran jika di masa pemerintahan Presiden Jokowi hubungan kedua negara semakin menguat dan menyeluruh. Seperti saat kunjungan Presiden

Jokowi ke Tiongkok pada 2015 di Balai Agung Rakyat (The Great Hall of People) Jokowi menyatakan bahwa Tiongkok merupakan teman dekat Indonesia, Tiongkok merupakan sahabat Indonesia, dan Tiongkok merupakan mitra strategi yang komprehensif yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Tiongkok menjadi salah satu negara target ekspor terbesar bagi Indonesia, sumber daya alam seperti nikel, batu bara, dan baja menjadi komoditas ekspor utama Indonesia ke Tiongkok. Adanya kebangkitan Tiongkok membuat negaranya menjadi negara superpower yang dapat menyeimbangkan kekuatan Amerika Serikat.

Oleh karena itu kepentingan Indonesia untuk memanfaatkan peluang kerja sama dengan Tiongkok pada level geo-strategis dan geo-ekonomi menjadi faktor pendorong Presiden Jokowi memperkuat kemitraan dengan Tiongkok yang semula merupakan kemitraan strategis yang komprehensif menjadi *“Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People’s Republic of China and The Republic of Indonesia”*. Arah kebijakan politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan Jokowi menempatkan Tiongkok sebagai mitra strategis bagi Indonesia, demikian juga dengan Tiongkok yang menempatkan Indonesia sebagai negara prioritas dalam politik luar negeri Tiongkok. Kebijakan luar negeri di era pemerintahan Jokowi tertuang dalam visi misi pada gagasan Nawacita. Terdapat tiga hal yang menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan Jokowi. Yang pertama, kebijakan politik luar negeri Indonesia disusun dengan prinsip bebas-aktif yang dilandasi oleh kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim. Yang kedua, memperkenalkan identitas Indonesia sebagai negara maritim, dan yang

terakhir, mengoptimalkan diplomasi ekonomi untuk mewujudkan kemandirian, produktivitas, dan daya saing ekonomi.

Salah satu kerja sama strategis antara Indonesia-Tiongkok yang paling terlihat di era pemerintahan Joko Widodo adalah partisipasi Indonesia dalam program *Belt and Road Initiative* yang diinisiasi oleh Tiongkok. Indonesia menjadi mitra strategis dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan kawasan industri, seperti pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan kawasan industri Morowali (Wicaksana, 2019). Partisipasi aktif Indonesia dalam BRI tidak hanya mempercepat pembangunan domestik tetapi juga mempererat hubungan ekonomi dengan Tiongkok yang dewasa ini menjadi salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia.

Belt and Road Initiative menjadi kebijakan luar negeri Tiongkok yang yang semula hanya sebagai cara untuk mengatasi permasalahan pada ekspor di sektor manufaktur baja tetapi akhirnya berhasil menjadi kebijakan luar negeri Tiongkok yang bertujuan untuk membangun suatu koridor ekonomi dengan mengombinasikan kekuatan geopolitik dan geoekonomi negara-negara *middle power* di wilayah Eropa, Asia, dan Afrika dengan Tiongkok yang menjadi pusatnya. Arah kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi, yang dilandaskan oleh visi dan misi yang tertuang pada Nawacita yaitu mempromosikan identitas sebagai negara maritim juga sejalan dengan tujuan kebijakan luar negeri Tiongkok dibawah porgram kerja sama *Belt and Road Initiative*. Sejatinya jalur sutra Tiongkok (BRI) terfokus pada dua jalur perdagangan yaitu, *One Belt and One Road* yang membentang dari Eropa ,

Afrika, hingga Asia termasuk Indonesia. *One Belt* acuannya pada silk road economic belt yang menghubungkan Tiongkok dengan kawasan Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, Timur Tengah, hingga Eropa seperti yang dapat dilihat dari pembangunan jalur kereta, jalan raya, dan jaringan pipa gas baru. Sedangkan *One Road (21st Century Maritime Silk Road)* adalah jalur perdagangan berbasis laut yang menghubungkan kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa (Wibawati et al., 2018).



Gambar 2. 1. Peta Jalur BRI

Sumber : *GIS Report Online*

Sejak awal BRI diperkenalkan pada 2013 di Kazakhstan dan Indonesia, Presiden Xi Jinping terus berupaya untuk dapat mengimplementasikan kebijakan BRI di berbagai negara terutama Indonesia, upaya tersebut berhasil menyinambungkan tujuan dibangunnya kerja sama BRI dengan visi poros maritim

dunia Indonesia sehingga terciptanya MoU antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok tentang kerja sama promosi bersama dalam kerangka kerja visi poros maritim dunia dengan sabuk ekonomi jalur sutra Tiongkok dan prakarsa jalur sutra maritim abad 21. Ditambah, Presiden Jokowi sejak dilantik pada 2014 telah menyambut baik adanya kerja sama melalui Belt and Road Initiative dikarenakan sejalan dengan visinya sendiri untuk mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia (PMD).

Melalui *Belt and Road Initiative*, Tiongkok memberikan bantuan dana sebesar USD 124 miliar yang nantinya akan digunakan untuk membangun jalur kereta api cepat pada jalur darat dan pengembangan fasilitas pada jalur laut di negara-negara yang termasuk dalam wilayah Asia hingga Eropa yang dilewati dalam jalur sutra maritim dan darat serta menyepakati untuk membangun kerja sama melalui *Belt and Road Initiative*. Indonesia termasuk dalam negara yang setuju untuk menandatangani nota kesepahaman dalam koridor *Belt and Road Initiative* (BRI). Untuk mewujudkan visi dan misi menjadi poros maritim dunia (PMD), Pemerintah Indonesia dan Tiongkok menyepakati MoU tentang ‘*On Jointly Promoting Cooperation Within the Framework of the Global Maritime Fulcrum Vision and the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road Initiative*’ sehingga Indonesia menjadi salah satu mitra strategis bagi Tiongkok untuk merealisasikan konektivitas maritim melalui pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dibawah kerangka kerja sama *21st Century Maritime Silk Road* (Widhiyoga et al., 2024).

MoU tersebut membahas terkait peningkatan konektivitas regional dan memperkuat kerja sama ekonomi. Selain itu, melalui MoU ini diharapkan dapat merealisasikan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur khususnya yang akan menguntungkan melalui inisiatif BRI dan PMD (Fahrizal et al., 2019). Dalam MoU tersebut mengatur kerja sama di berbagai sektor yang meliputi, jalur kereta api, jembatan, pelabuhan, kawasan industri, investasi, energi, perdagangan, kesehatan, *sister city*, dll. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, Tiongkok masih menjadi mitra dagang terbesar di Indonesia, terutama dalam ekspor sumber daya alam seperti batu bara, minyak sawit, karet, dan impor barang-barang manufaktur. Namun, Indonesia masih mengalami banyak kendala dalam pembangunan infrastruktur yang akan digunakan sebagai jalur perdagangan untuk mendorong peningkatan ekspor. Selain itu, gagasan Presiden Jokowi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim dan menjadi poros maritim dunia diharapkan dapat terwujud dengan adanya kerja sama melalui implementasi proyek-proyek di bawah koridor *Belt and Road Initiative*.

Fokus kerja sama Tiongkok-Indonesia sebelum terjadinya pandemi Covid-19 tidak hanya pada sektor pembangunan infrastruktur, namun Tiongkok juga menjadi salah satu investor utama dalam berbagai sektor strategis Indonesia. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2018-2019, Tiongkok menempati posisi kedua sebagai negara asal investasi asing terbesar di Indonesia khususnya pada sektor manufaktur, energi, dan teknologi (Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2019). Oleh karena itu,

menunjukkan bahwa semakin meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap investasi dan teknologi asal Tiongkok.

Selain pada sektor ekonomi dan infrastruktur, kerja sama Indonesia-Tiongkok di bidang kesehatan sebelum pandemi Covid-19 juga telah mengalami perkembangan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Indonesia telah menjalin beberapa bentuk kerja sama di bidang kesehatan, yaitu yang pertama adalah pertukaran pengetahuan dan pelatihan tenaga medis, kerja sama penanggulangan penyakit menular seperti malaria dan HIV/AIDS, dan peningkatan investasi di sektor farmasi dan alat kesehatan terutama dalam produksi bahan baku obat dan alat kesehatan, bahkan hingga pertukaran pelajar di bidang kedokteran dan kesehatan bagi mahasiswa Indonesia yang akan melanjutkan studi kedokteran dan kesehatan di Tiongkok.

Meskipun kerja sama di sektor kesehatan sebelum terjadinya pandemi Covid-19 belum sebesar dan seintens sektor lain, namun hal tersebut menjadi fondasi awal bagi intensifikasi kolaborasi Indonesia-Tiongkok ketika krisis pandemi Covid-19 terjadi. Seperti yang terdapat dalam jurnal karya (Huang, 2021), menurutnya kerja sama kesehatan yang telah dijalin sebelum pandemi memberikan keuntungan strategis bagi Tiongkok dalam merespon pandemi di Asia Tenggara. Kerja sama pada sektor kesehatan yang telah terjalin sebelumnya memudahkan mobilisasi bantuan kesehatan, distribusi alat-alat kesehatan, hingga kerja sama vaksin yang secara masif dilakukan oleh Tiongkok selama pandemi Covid-19 (Huang, 2021).

2.2 Awal Mula Penyebaran Covid-19 Hingga Menjadi Pandemi Global

Covid-19 adalah penyakit menular yang mengakibatkan penderitanya mengalami gangguan sistem pernapasan. Penyakit ini disebabkan oleh virus korona yang memiliki nama ilmiah SARS-COV-2, karena penularannya yang mudah dari manusia ke manusia hanya melalui *droplet* atau tetesan kecil dari hidung dan mulut ketika sedang flu, batuk, maupun berbicara, sehingga penyebaran virus Covid-19 sangat cepat dan masif menyebar ke seluruh masyarakat di berbagai negara hingga akhirnya virus Covid-19 dikategorikan sebagai pandemi. Virus korona memang bukan virus yang baru ditemukan, yang sebelumnya juga virus korona telah menyebabkan wabah SARS dan MERS. Namun pada penyakit Covid-19 disebabkan oleh jenis baru dari virus korona yaitu SARS-COV-2 yang menyebabkan penularan Covid-19 dari manusia ke manusia lebih mudah dibanding jenis *coronavirus* sebelumnya.

Coronavirus merupakan virus-virus yang bertransmisi dari hewan atau dapat disebut “*zoonotic virus*”, sedangkan ketika proses perpindahan virus tersebut ke manusia kepada manusia pertama kali disebut “*spillover event*” (WHO, 2020). SARS-COV-2 menjadi coronavirus ke-9 yang bisa menginfeksi manusia, dan coronavirus ke-7 yang telah teridentifikasi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir (Lednicky, et al., 2021). Covid-19 pertama kali pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok pada Desember 2019. Awal mulanya Tiongkok melaporkan kepada WHO bahwa terdapat beberapa kasus pneumonia yang belum diketahui penyebabnya. Lalu, sembilan hari setelahnya otoritas kesehatan Tiongkok menyatakan bahwa

ditemukan virus korona jenis baru yang kemudian dinamakan menjadi SARS-COV-2 penyebab penyakit Covid-19 (BBC Indonesia, 2020).

Sejak penemuan jenis virus corona terbaru di Wuhan yang menyebabkan penyakit Covid-19, terdapat banyak kontroversi sehingga menimbulkan perdebatan bagi masyarakat di berbagai negara tentang darimana virus SARS-COV-2 berasal. Beberapa diantaranya mengklaim bahwa SARS-COV-2 merupakan zoonotic virus yang serupa dengan virus korona sebelumnya, namun terdapat beberapa pihak yang mencurigai asal usul virus SARS-COV-2 bersumber dari adanya kebocoran laboratorium di Wuhan. Kontroversi pernyataan tersebut muncul karena virus SARS-COV-2 pertama kali teridentifikasi di Wuhan, yang menjadi Kota dengan laboratorium virologi utama peneliti *coronaviruses* (Holmes, et al., 2021). Pada akhirnya sejalan dengan perkembangan penelitian yang dilakukan, para ilmuwan akhirnya berhasil mengidentifikasi asal dari SARS-CoV-2. Virus ini dibawa oleh kelelawar spesies genus *rhinolophus* (WHO, 2021).

Setelah melakukan penelitian dan investigasi, diketahui bahwa dari 55% kasus yang terjadi selama bulan Desember 2019 para pasien yang terjangkit Covid-19 memiliki kontak dengan Pasar Huanan maupun pasar lainnya di Kota Wuhan. Berdasarkan hasil investigasi, Pasar Huanan menjual 38 jenis binatang termasuk kelelawar yang memang menjadi hewan pembawa virus SARS-COV-2. Mengetahui hal tersebut, pemerintah Tiongkok menutup Pasar Huanan dan melarang memperjualbelikan hewan liar yang bukan ternak untuk dikonsumsi pada Januari 2020 lalu baru pada akhirnya dilarang permanen pada 24 Februari 2021 (MacDonald, 2021). Sejak kasus Covid-19 teridentifikasi di Tiongkok,

WHO meminta Tiongkok untuk membagikan informasi tersebut kepada negara-negara di komunitas internasional. Tiongkok pun mengirimkan laporan yang berisi informasi singkat tentang 44 kasus pertama Covid-19 yang terjadi. WHO lalu membagikan informasi tersebut ke seluruh negara melalui sistem informasi IHR pada 5 Januari 2020 (WHO, 2021).

Sehabis membagikan informasi terkait kasus Covid-19 ke setiap negara, tidak berselang waktu lama, WHO mengadakan pertemuan untuk membahas wabah baru tersebut. Di hari pertemuan pertama, WHO mendapatkan laporan bahwa semakin meningkatnya kasus penyebaran Covid-19 sebanyak 314 kasus yang mana 4 diantaranya berasal dari luar Tiongkok (WHO, 2020). Karena penularan virus yang mudah dan lebih cepat, seiring berjalannya waktu kasus Covid-19 semakin meningkat penyebarannya ke berbagai negara. Sebanyak 98 kasus di 18 negara selain Tiongkok yang membuat komunitas internasional mendesak WHO agar mendeklarasikan Covid-19 sebagai PHEIC (Public Health Emergency of International Concern). Kemudian setelah dideklarasikan sebagai PHEIC, penyebaran Covid-19 semakin merebak hingga ke 53 negara dengan jumlah kasus sebanyak 5304 kasus pada 1 Februari 2020 membuat Covid-19 berada dalam fase post-PHEIC. Semakin meningkatnya penyebaran wabah Covid-19 hingga ke seluruh penjuru dunia kecuali wilayah Antartika membuat WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020.

2.3 Health Silk Road Sebagai Fokus Utama Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Selama Pandemi di Bawah Program *Belt and Road Initiative*

Tiongkok mengimplementasikan program kebijakan BRI di Indonesia dengan memberikan bantuan pinjaman dana dan investasi dari perusahaan Tiongkok untuk berhasil membangun infrastruktur vital di Indonesia sehingga akan tercipta konektivitas yang diharapkan. Seperti pada pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, sebelumnya Indonesia telah melakukan studi kelayakan untuk membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan melakukan kerja sama dengan *Japan International Cooperation Agency*. Jepang memang sudah berkeinginan lebih dulu untuk menjadi investor dalam proyek kereta cepat tersebut dibandingkan Tiongkok. Lalu melalui program BRI, Tiongkok menyatakan keinginannya untuk mendanai pembangunan proyek tersebut. Di situasi tersebut Indonesia pun menghadapi dilema karena terdapat dua negara yang ingin menjadi investor dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, namun karena Jepang meminta adanya jaminan dari pemerintah Indonesia sedangkan Tiongkok bersedia menjadi investor dengan skema *business to business* sehingga Indonesia memilih Tiongkok untuk menjadi investor pembangunan kereta cepat.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulai disepakati pada 2016 dengan skema B to B yang melibatkan perusahaan kereta api Tiongkok (China Railway International) sebagai tender dari proyek tersebut. Investasi dan penyediaan pinjaman dana oleh Tiongkok untuk merealisasikan proyek di bawah kerangka kerja sama BRI dilakukan dengan membangun berbagai infrastruktur yang

dibutuhkan oleh Indonesia. Kehadiran Tiongkok sebagai investor dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi strategi awal bagi Tiongkok untuk mewujudkan Belt and Road Initiative di Indonesia. Indonesia mendapatkan bantuan pinjaman dana dari China Development Bank (CDB) sebesar 5,5 miliar dollar AS atau 75% dari biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Namun Pandemi Covid-19 memiliki pengaruh yang besar terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur di bawah program BRI. Pada awal Januari 2020, terdapat 2951 proyek pembangunan di seluruh dunia yang terkait dengan program Belt and Road Initiative senilai 3,87 triliun dolar. Namun, pandemi yang memiliki dampak besar bagi seluruh dunia menjadi hambatan besar bagi proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang telah berjalan seperti pada proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung harus tertunda penyelesaiannya akibat adanya pembatasan sosial karena untuk menghentikan penyebaran virus SARS-COV-2. Berdasarkan laporan dari artikel al-jazeera, pandemi Covid-19 terbukti mengganggu progress proyek pembangunan infrastruktur yang merupakan bagian proyek pembangunan dari program Belt and Road Initiative sehingga menyebabkan di sebagian besar negara harus tertunda. Seperti di Indonesia menurut pernyataan Menko bidang Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa sebanyak 300 orang pekerja asal Tiongkok masih berada di Tiongkok dan tidak bisa melakukan perjalanan ke Indonesia (Iain Marlow et al., 2020).

Pandemi Covid-19 mempengaruhi perubahan orientasi kebijakan luar negeri Tiongkok, yang pada awalnya Tiongkok memfokuskan alokasi pendanaan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur di bawah program Belt and Road Initiative (BRI) namun sejak terjadinya Covid-19 alokasi pendanaan dialihkan menjadi penyediaan bantuan alat-alat medis dan sarana kesehatan yang berguna untuk menangani pandemi Covid-19. Karena di tengah krisis ekonomi global akibat pandemi, negara-negara juga harus menyiapkan biaya yang sangat besar untuk menangani Covid-19, tentunya hal ini menjadi tantangan bagi negara-negara berkembang selain terkena dampak dari krisis, negara-negara berkembang terutama Indonesia juga harus menyiapkan dana yang besar untuk menyediakan alat-alat kesehatan dan vaksin untuk mengatasi penyebaran Covid-19.

Akibatnya, negara-negara yang menjadi mitra kerja sama dalam program BRI selama pandemi tidak meminjam dana dari Tiongkok untuk menyelesaikan proyek pembangunan infrastruktur melalui BRI, karena pandemi menyebabkan ketidakpastian pada kondisi kesehatan hingga ekonomi secara global yang membuat seluruh negara lebih memfokuskan pada urusan domestik untuk memenuhi penyediaan fasilitas dan alat-alat kesehatan yang berguna untuk menanganani Covid-19 di negaranya masing-masing. Sehingga proyek-proyek pembangunan infrastruktur melalui program BRI banyak yang mengalami penundaan hingga satu tahun dalam penyelesaiannya hingga beroperasi termasuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Indonesia.

Pandemi Covid-19 menjadi bukti bahwa krisis kesehatan global sangat berdampak terhadap situasi ekonomi global. Pandemi menghentikan roda

perekonomian global, meningkatkan ketegangan politik sehingga memicu ketidakpercayaan kepada negara lain, dan memperparah ketimpangan sosial. Krisis kesehatan global selama pandemi Covid-19 hingga berdampak terhadap krisis ekonomi yang terjadi secara global, bahkan menyebabkan negara-negara harus berjuang melawan pandemi di tengah kondisi krisis ekonomi global, oleh karena itu banyak negara-negara maju yang biasanya menjadi negara donor namun pada awal penyebaran Covid-19 sebagian negara donor seperti Amerika Serikat, Inggris, negara-negara Uni Eropa, Kanada, dan Jepang justru lebih memilih untuk menyepakati perjanjian bilateral dengan perusahaan farmasi untuk mengamankan kebutuhan *stock* vaksin mereka untuk nantinya di bandingkan memberikannya kepada negara-negara berkembang yang banyak mengalami hambatan untuk menangani pandemi Covid-19 seperti halnya Indonesia.

Oleh karena itu, sejak penyebaran Covid-19 meluas hingga ke seluruh negara, Tiongkok mulai mempromosikan adanya gagasan Health Silk Road yang merupakan perpanjangan dari program Belt and Road Initiative yang memfokuskan pada kerja sama di bidang kesehatan. Melalui Health Silk Road, Tiongkok memfasilitasi pengendalian penyebaran Covid-19 di negara-negara yang menjadi mitra kerja sama BRI. Pandemi Covid-19 yang membawa dampak negatif pada perekonomian yang menimbulkan banyak keraguan bahwa apakah proyek-proyek infrastruktur yang menelan biaya yang sangat mahal dan kontroversial akan dapat diselesaikan di bawah kerja sama *Belt and Road Initiative* (BRI). Oleh karena itu, Tiongkok mempromosikan Health Silk Road Initiative sebagai program dari kerja sama BRI yang lebih memfokuskan pada

fondasi infrastruktur kesehatan BRI. Tentunya HSR menjadi lebih relevan untuk diterapkan di tengah terjadinya pandemi yang mana seluruh negara sangat membutuhkan peningkatan fasilitas dan infrastruktur kesehatan.

Health Silk Road diimplementasikan melalui diplomasi kesehatan yang dilakukan dengan cara memberikan bantuan alat-alat kesehatan, pengiriman tim-tim kesehatan untuk berbagi pengalaman dalam mengatasi Covid-19, peningkatan kapasitas , bahkan hingga pembangunan infrastruktur kesehatan seperti dalam pembangunan pabrik vaksin. Tiongkok berkomitmen dalam mengimplementasikan HSR seperti yang terdapat dalam *white paper* yang berjudul *Fighting Covid-19: China in Action* yang dipublikasikan pada 7 Juni 2020, pada white paper tersebut memuat pernyataan Tiongkok bahwa Health Silk Road (HSR) dewasa ini merupakan prioritas utama Tiongkok dalam rencana pembangunan ekonomi dan sosialnya sehingga Tiongkok berkomitmen untuk tetap memberikan bantuan penanganan Covid-19 (ADB, 2021). Dalam pidatonya, Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa Tiongkok terus berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain khususnya di sektor kesehatan dan juga memberikan bantuan dana, terutama bagi negara berkembang ataupun negara yang paling terdampak Covid-19 seperti Indonesia.

2.4 Bantuan Luar Negeri Tiongkok dalam Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia

Bantuan luar negeri merupakan instrumen yang penting dalam kebijakan luar negeri, yang dapat digunakan suatu negara untuk mengoptimalkan hubungan secara bilateral maupun multilateral antar negara-negara yang bersangkutan. Riddell (2007) mengemukakan bahwa bantuan luar negeri mencakup semua sumber daya dari negara donor ke penerima termasuk barang, keterampilan dan pengetahuan teknis, dana hibah (hadiah), maupun pinjaman. Barang atau komoditas yang diberikan melalui bantuan luar negeri umumnya obat-obatan dan makanan. Bantuan luar negeri yang diberikan Tiongkok untuk menangani Covid-19 di Indonesia termasuk ke dalam jenis bantuan kemanusiaan. Bentuk dari bantuan kemanusiaan yang diberikan terdiri dari bantuan material dan bantuan teknis.

Bantuan material diberikan Tiongkok dengan mendonasikan alat-alat kesehatan dalam jumlah yang masif seperti alat pelindung diri (APD), masker bedah, *ventilator portable*, masker N95, sarung tangan medis, peralatan swab PCR, *thermometer gun*, obat anti virus, generator oksigen, dan peralatan kesehatan lainnya. Tiongkok menjadi negara yang dari awal konsisten membantu Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19. Tiongkok membantu Indonesia menangani Covid-19 sejak awal virus tersebut terdeteksi di Indonesia pada bulan Maret 2020. Berdasarkan pernyataan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian, Tiongkok memastikan kesiapannya untuk membantu Indonesia berjuang mengatasi pandemi Covid-19, dengan memberikan bantuan secara masif yang

disalurkan melalui pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia. Pada awal penyebaran Covid-19 di Indonesia, karena kurang kesiapan Indonesia untuk menanggulangi pandemi sehingga berdampak terhadap kelangkaan pasokan alat-alat kesehatan seperti masker, alat pelindung diri, dan alat medis lainnya yang dapat digunakan untuk menangani Covid-19.

Kurang memadainya fasilitas kesehatan yang tersedia di sejumlah rumah sakit akibat fasilitas kesehatan yang tidak mencukupi menyebabkan tingginya penambahan kasus harian akibat infeksi Covid-19 dan semakin meningkatnya jumlah pasien yang meninggal akibat pandemi. Bahkan Indonesia sempat berada pada posisi tertinggi di dunia dalam jumlah kasus harian Covid-19. Kelangkaan alat-alat kesehatan dan ketidaksiapan fasilitas serta infrastruktur kesehatan untuk menanggulangi pandemi memicu rasa empati dari Tiongkok sebagai negara yang memiliki hubungan yang erat dengan Indonesia. Tiongkok mengirimkan bantuan secara material melalui pengiriman alat-alat kesehatan dan vaksin dan bantuan teknis yang dilakukan dengan mengadakan konferensi untuk membagikan pengalaman Tiongkok menangani Covid-19, serta kerja sama dan transfer teknologi dalam pengembangan obat-obatan dan vaksin. Tiongkok berkomitmen ingin membantu Indonesia dari berbagai aspek penanggulangan pandemi.

Diperkirakan jumlah keseluruhan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan Tiongkok telah melebihi \$10 juta dolar USD yang nantinya masih akan terus bertambah. Berikut tabel bantuan alat-alat kesehatan Tiongkok untuk menangani Covid-19 di Indonesia :

Tabel 2. 1. Bantuan Alat-Alat Kesehatan Tiongkok

Tanggal	Jenis Bantuan	Jumlah/Deskripsi Bantuan	Pihak yang Memberi
24 Maret 2020	APD Tenaga Medis	7,2 ton pakaian APD, 128 kg masker N95, 110 kg sarung tangan, 700 kg <i>surgical mask</i> , ventilator portabel beserta 775 kg goggles	Pemerintah Tiongkok disalurkan melalui Kemhan dan TNI
27 Maret 2020	Alat-alat kesehatan <i>batch 1</i>	40 ton APD lengkap, masker N95, masker bedah, peralatan swab, serta alat PCR dan RNA.	Perusahaan-perusahaan asal Tiongkok (Investor Tiongkok)
12 Mei 2020	Alat-alat kesehatan <i>batch 2</i>	Alat rapid test, masker medis, KN95 respirator, <i>medical goggles, disposable medical protective screen, disposable waterproof isolation gown, medical boot cover, disposable nitrile glove, infusion pump, knapsack disinfectant sprayer 16 L, infrared forehead thermometer dan thermal imaging thermometer helmet.</i>	Pemerintah Tiongkok dan CSR dari beberapa perusahaan-perusahaan Tiongkok (Investor)
6-10 Juni 2020	Bantuan alat-alat	1,4 juta masker bedah, 50 unit	Pemerintah pusat

	medis lanjutan	ventilator portabel, 100.000 alat tes PCR, 70.000 masker pelindung, 70.00 PPE, 400 generator oksigen	dan daerah Tiongkok
Juni 2020	Bantuan alat-alat kesehatan	50 ventilator portabel, 150.008 alat tes PCR, 80.000 masker medis, dan 80.000 PPE	Pemerintah Tiongkok
24 September 2021	Bantuan vaksin sinovac dan sinopharm (jadi)	1 juta dosis sinovac (Pemerintah Tiongkok), 1 juta dosis dari perusahaan sinovac, dan 200.000 sinopharm dari palang merah China	Pemerintah Tiongkok, PT Sinovac, dan <i>Red Cross China</i>
26 Oktober 2021	Vaksin Sinovac	1 juta dosis vaksin siap pakai (jadi)	Pemerintah Tiongkok
21 Desember 2021	Vaksin Sinovac	2 juta dosis vaksin siap pakai (jadi)	Pemerintah Tiongkok

Sumber : Data diolah penulis dari berbagai sumber literatur

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukan keseriusan Tiongkok dalam memberikan bantuan penanganan Covid-19 di Indonesia terutama dalam bentuk material seperti pemberian alat-alat kesehatan. Tidak hanya sebatas memberikan bantuan secara material saja melalui pengiriman jutaan alat-alat kesehatan, Tiongkok juga memberikan bantuan berupa keterampilan dan pengetahuan teknis. Ketika pandemi Covid-19 semakin merebak, Tiongkok

mengadakan konferensi secara virtual yang melibatkan para ahli medis asal negaranya untuk membagikan pengalamannya dalam menanggulangi pandemi Covid-19 agar tenaga medis Indonesia bisa mengimplemetasikannya ketika terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Konferensi tersebut diadakan pada 12 Mei 2020 oleh para pakar medis militer dari pemerintah Tiongkok dan Indonesia, dalam konferensi yang diadakan secara virtual ini pemerintah Tiongkok membagikan pengalaman mereka terkait bagaimana respon Tentara Pembebasan Rakyat terhadap Covid-19, konstruksi dan manajemen rumah sakit sementara dan menjawab berbagai pertanyaan dari ahli medis Indonesia terkait penggunaan plasma, steroid, dan pengobatan herbal terhadap diagnosis dan pengobatan pasien Covid-19.

Namun, tidak berhenti sampai disitu saja, Tiongkok kembali membuktikan komitmennya dalam membantu dan mendukung Indonesia dalam penanganan Covid-19. Ketika Tiongkok berhasil memproduksi vaksin Covid-19 melalui perusahaan farmasinya yaitu Sinovac. Tiongkok mulai gencar melakukan diplomasi vaksin ke berbagai negara termasuk Indonesia. Diplomasi vaksin erat kaitannya dengan aktivitas atau hubungan diplomatik antar kedua negara yang terlibat sebagai penerima, pengadaan dan pendistribusian vaksin. Indonesia menjadi salah satu negara yang diprioritaskan Tiongkok dalam pendistribusian vaksin sinovac, terbukti Tiongkok telah mendistribusikan sebanyak 215 juta bulk (bahan baku) vaksin untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan vaksin di Indonesia (Badan POM RI, 2021). Tiongkok mengimplementasikan diplomasi vaksin salah satu caranya dengan mengunjungi negara-negara yang menjadi mitra Tiongkok

terutama di wilayah Asia Tenggara untuk membangun kerja sama di bidang pengembangan dan penyediaan vaksin.

Indonesia juga mendapatkan bantuan teknis dari Tiongkok melalui transfer teknologi kepada PT Bio Farma untuk mendukung Indonesia mampu memproduksi vaksin secara mandiri. Sejak pandemi Covid-19, semakin memperkuat kerja sama Indonesia-Tiongkok terutama di bidang kesehatan, seperti dalam pernyataan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia menyatakan bahwa pemerintah Tiongkok mempersiapkan perusahaan farmasi Indonesia menjadi salah satu rumah produksi vaksin asal Tiongkok untuk memenuhi produksi vaksin di Asia Tenggara. Pernyataan tersebut dibenarkan melalui pernyataan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi menyatakan bahwa Tiongkok akan menunjukkan komitmennya untuk membantu langkah-langkah Indonesia menjadi *manufacture house* atau pusat produksi vaksin Covid-19 di Asia Tenggara melalui kerja sama pembuatan vaksin antara perusahaan Sinovac dan Bio Farma (Soeriaatmadja, 2021).

2.5 Kerja Sama Bilateral Indonesia-Tiongkok di Bidang Kesehatan Pasca Terjadinya Pandemi Covid-19

Sejak terjadinya pandemi Covid-19, negara-negara di dunia internasional lebih memperhatikan sektor kesehatan sebagai bidang kerja sama bilateral yang strategis terutama bagi Tiongkok. Dikarenakan pandemi Covid-19 menunjukkan bagaimana sebuah wabah penyakit dapat berdampak luas ke berbagai sektor penting termasuk ekonomi. Pandemi Covid-19 juga menjadi bukti bahwa sebagian negara maju yang sudah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai tetap kewalahan dalam mengatasi Covid-19 di negaranya. Oleh karena itu, pasca terjadinya Covid-19, Tiongkok merumuskan kebijakannya lebih memprioritaskan terhadap kerja sama kesehatan yang terdapat dalam agenda inisiatif health silk road yang merupakan perluasan dari program belt and road initiative (BRI) di bidang kesehatan.

Salah satu tonggak penting kerja sama kesehatan antara Indonesia-Tiongkok di era pandemi adalah kolaborasi dalam pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19. Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang menerima pengiriman vaksin Sinovac dari Tiongkok. Program vaksinasi ini diperkuat dengan adanya kerja sama antara Bio Farma dan Sinovac dalam kegiatan produksi, distribusi, dan transfer teknologi. Upaya tersebut menjadi salah satu bagian dari diplomasi kesehatan Tiongkok yang bertujuan membangun citra sebagai pemimpin kesehatan global dan aktor yang bertanggung jawab (Huang, 2021). Selain pengadaan vaksin, Tiongkok juga memberikan bantuan teknis melalui pelatihan bagi tenaga medis Indonesia, transfer pengetahuan dalam

pengembangan vaksin, dan dukungan penguatan infrastruktur kesehatan pasca pandemi Covid-19 (WHO,2020).

Pandemi Covid-19 semakin meningkatkan kerja sama Tiongkok-Indonesia di bidang kesehatan, dengan terlibat dalam kerja sama penelitian bersama terkait pengembangan vaksin Covid-19 generasi terbaru dan teknologi diagnosis yang cepat mendeteksi Covid-19 (Li & Yu, 2023). Kebijakan luar negeri dan sikap Tiongkok dalam menangani pandemi Covid-19 sejak awal terjadinya pandemi cenderung lebih aktif dalam menjalin kerja sama terutama di bidang kesehatan seperti yang tertuang dalam buku putih (*white paper*) tahun 2020. Dalam buku putih (*white paper*) tahun 2020 yang berjudul “*Fighting Covid-19: China in Action*” berisi tentang sikap dan kebijakan luar negeri Tiongkok dalam menangani pandemi Covid-19 dengan berpartisipasi aktif dalam memberikan bantuan penanganan pandemi melalui pemberian bantuan dan informasi serta pengalaman Tiongkok dalam mengatasi Covid-19 di negara-negara berkembang terutama Indonesia. Ketika terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan Tiongkok merubah orientasi kebijakannya menjadi berfokus pada kerja sama di bidang kesehatan melalui inisiatif health silk road. Tidak hanya memberikan bantuan alat-alat medis untuk mencegah dan menanggulangi Covid-19, namun Tiongkok juga membangun kerja sama dengan negara-negara *mitra belt and road initiative* termasuk Indonesia untuk mengembangkan penelitian terhadap vaksin dan obat-obatan (State Council Information Office of China,2020).

Tiongkok mengimplementasikan kebijakannya tersebut melalui kerja sama bilateral antara Tiongkok-Indonesia dalam pembangunan pabrik vaksin di Indonesia pada tahun 2022. PT Etana menjalin kerja sama dengan perusahaan farmasi milik Tiongkok sehingga terjadinya transfer teknologi yang membuat Indonesia dapat memproduksi vaksin Covid-19 berbasis mRNA secara mandiri (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Kerja sama bilateral antara Indonesia-Tiongkok di bidang kesehatan pasca Covid-19 tidak hanya meliputi produksi vaksin saja, namun sejak pasca pandemi Tiongkok semakin meningkatkan kerja sama bilateral antara Indonesia-Tiongkok di sektor kesehatan lainnya tidak sebatas pada penanganan wabah Covid-19 saja namun beberapa penyakit termasuk penyakit menular lainnya.

Pasca terjadinya pandemi Covid-19, Tiongkok dan Indonesia semakin meningkatkan kerja sama di bidang kesehatan dengan menandatangani MoU berkaitan dengan rencana kerja sama di bidang kesehatan pada tahun 2020. Kedua negara tersebut menyepakati terdapat 5 kerja sama di sektor kesehatan yang meliputi: pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit kronis, kesiapsiagaan dan tanggap darurat kesehatan termasuk pengawasan sistem peringatan dini. Penguatan sistem dan layanan kesehatan, perencanaan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan peningkatan kapasitas dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan bersama dalam ilmu kesehatan, serta pengobatan tradisional. Setelahnya di tahun 2022, kerja sama bilateral di bidang kesehatan antara Indonesia-Tiongkok semakin dipererat dengan ditandatanganinya MoU terkait rencana pembangunan pusat

penelitian dan pengembangan bersama Tiongkok dan Indonesia terkait vaksin dan genomik.

Kerja sama di bidang kesehatan yang dijalin Tiongkok dan Indonesia pasca Covid-19 lebih berfokus pada transformasi di bidang kesehatan bagi Indonesia dan peningkatan investasi Tiongkok di sektor kesehatan. Pemerintah dan Perusahaan industri farmasi Tiongkok telah berperan terhadap transformasi kesehatan di Indonesia melalui 23 kerja sama di bidang farmasi dan alat kesehatan, 3 kerja sama pada sektor rumah sakit, dan 1 kerja sama pada bioteknologi. Sejak Covid-19, kerja sama kesehatan melalui riset dan pengembangan semakin meningkat implementasiannya. Tenaga medis dari Tiongkok seringkali memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan SDM tenaga medis di Indonesia, seperti pada tahun 2024 di bangun kerja sama antara RS Zhongshan dan Peking Union Medical College yang kedepannya selama 5 tahun akan melakukan pelatihan bagi dokter, perawat jantung di Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018).

Dalam pengimplementasian MoU terkait pembangunan pusat penelitian dan pengembangan di sektor kesehatan di tahun 2022 dilakukan dengan adanya kerja sama antara Kemenkes dan Tsinghua University dengan membangun pusat penelitian dan pengembangan bersama untuk vaksin dan genomik yang telah diresmikan pada Agustus 2024, pembangunan tersebut menjadi wujud implementasi dari health silk road yang menjadi prioritas kebijakan luar negeri Tiongkok ketika terjadinya pandemi Covid-19 (Humas BKPK, 2022). Komitmen jangka panjang ini membuktikan bahwa Health Silk Road bukan hanya slogan

semata, melainkan strategi implementatif melalui MoU, investasi industri, dan transfer SDM yang nyata

Diplomasi kesehatan yang dijalankan oleh Tiongkok selama pandemi COVID-19 tidak hanya berfokus pada upaya percepatan penanggulangan krisis kesehatan, tetapi juga memiliki tujuan lain, yakni memperluas pengaruh politik dan ekonomi Tiongkok di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Indonesia dipandang sebagai mitra yang strategis oleh Tiongkok, mengingat letak geografis yang cukup penting serta potensi pasar domestik yang besar. Sejalan dengan hal tersebut, Zhang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa inisiatif Health Silk Road digunakan Tiongkok sebagai salah satu instrumen utama dalam meningkatkan kepercayaan internasional, khususnya setelah munculnya kritik terkait transparansi penanganan awal pandemi. Melalui Health Silk Road, Tiongkok tidak hanya memperluas jangkauan kerja sama di sektor kesehatan, tetapi juga memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat pengaruh geopolitiknya khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, kerja sama Indonesia dan Tiongkok selama pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak di sektor kesehatan, tetapi juga memunculkan implikasi sosial-politik. Dukungan dan bantuan yang diberikan oleh Tiongkok turut membangun citra positif negara tersebut di hadapan masyarakat Indonesia, sekaligus menegaskan posisi Tiongkok sebagai salah satu kekuatan global yang aktif membantu negara-negara berkembang dalam menghadapi situasi krisis.

Namun demikian, di sisi lain terdapat kekhawatiran terkait potensi meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap produk dan teknologi

Tiongkok, yang berpotensi memengaruhi posisi tawar Indonesia dalam hubungan bilateral di masa mendatang. Indonesia dianggap memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan industri vaksin di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini, Tiongkok secara aktif mendorong investasi serta pembangunan fasilitas produksi vaksin dan alat kesehatan di Indonesia. Upaya tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan sektor kesehatan dalam negeri, tetapi juga memberikan peluang bagi Tiongkok untuk memperluas akses dan distribusi produk kesehatannya ke tingkat regional. Diplomasi kesehatan yang dijalankan oleh Tiongkok selama pandemi COVID-19 tidak hanya berfokus pada upaya percepatan penanggulangan krisis kesehatan, tetapi juga memiliki tujuan lain, yakni memperluas pengaruh politik dan ekonomi Tiongkok di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Indonesia dipandang sebagai mitra yang strategis oleh Tiongkok, mengingat letak geografis yang cukup penting serta potensi pasar domestik yang besar.